



**KATALOG  
PERATURAN MENTERI, KEPUTUSAN MENTERI  
DAN INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI  
DARI TAHUN 1980 S.D. 2005  
DENGAN STATUS/ASPEK LEGALITASNYA**



**INVENTARIS BARANG MILIK DAERAH  
SETDA KABUPATEN BUTON**

**5.2.3.82.07**

**TIDAK DIBENARKAN MEMINDAHKAN BARANG-BARANG YANG  
BERADA DIRUANGAN TANPA SEIZIN PENANGGUNGJAWAB  
RUANGAN ATAU PENGURUS BARANG**

Disusun Oleh  
**BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDERAL  
DEPARTEMEN DALAM NEGERI**  
Jl. Medan Merdeka Utara No. 7  
Jakarta  
Tahun 2005

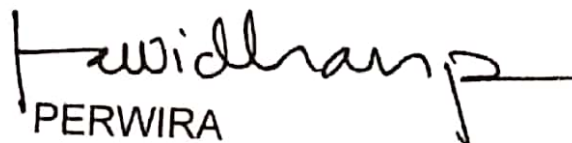
## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Karena atas rahmat dan karunianya dapat tersusun Buku Katalog Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri yang dikeluarkan sejak Tahun 1946 s/d Tahun 2005.

Penerbitan Buku katalog ini disajikan dalam rangka untuk membantu bagi yang membutuhkan informasi mengenai Peraturan Perundang-undangan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Semoga dengan hadirnya buku ini dapat bermanfaat bagi pelaku birokrasi di pemerintahan, baik di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

A.n. Sekretaris Jenderal  
Kepala Biro Hukum,

  
PERWIRA

*Tim Penyusun*

1. *Drs. Denty Ierdan, MM*
2. *Drs. Eduard Sudharma Pudji*
3. *Drs. Soenarno*
4. *Mahendra Basuki, SH*
5. *Henry Hutagalung, SH*

**Penjelasan singkatan-singkatan :**

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Angkt.	: Angkatan
BPHN-DEPKEH	: Badan Pembinaan Hukum Nasional - Departemen Kehakiman dan HAM
Dati I / II	: Daerah Tingkat I / II
DDN	: Departemen Dalam Negeri
dg	: dengan
D.I	: Daerah Istimewa
D.I.Y	: Daerah Istimewa Yogyakarta
dIm	: dalam
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HPPN	: Himpunan Peraturan Peraturan Negara
HPPRI	: Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia
HPPU-DDN	: Himpunan Peraturan Perundang-undangan Departemen Dalam Negeri.
Intl.	: International
ILO	: International Labour Organization
Kab.	: Kabupaten
Kep.	: Kepulauan
LNRI	: Lembaran Negara Republik Indonesia
LN	: Lembaran Negara
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
OTK	: Organisasi dan Tata Kerja
Pelaks.	: Pelaksanaan
Pem.	: Pemerintah
PERPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
PMD	: Pemberdayaan Masyarakat Desa
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
Prop.	: Propinsi
Prov.	: Provinsi
PT	: Pengadilan Tinggi
Rep.	: Republik
RI	: Republik Indonesia
RIS	: Republik Indonesia Serikat
SETNEG	: Sekretariat Negara
SOTK	: Susunan Organisasi dan Tata Kerja
TA	: Tahun Anggaran
TLN	: Tambahan Lembaran Negara
Ttg	: Tentang
UU	: Undang-Undang
Wil.	: Wilayah
Wkl	: Wakil
yg	: yang